PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 21 TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2027

Sarilamak, Agustus 2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-6
1.3. Maksud dan Tujuan I-9
1.4. Sistimatika Penulisan I-1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-10
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-15
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II -17
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan oleh Masayarakat II - 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah III-2
3.3. Program dan Kegiatan III6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V **KINERJA** PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN V-1
5.1 Indikator Kinerja Utama V-1
5.2 indikator Kinerja Kunci V-2
BAB VI PENUTUP VI-1
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja 2025 VI-1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan VI-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kalender Rencana Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2027	I -1
Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2026	II-2
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota	II-11
Tabel 2.3.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027	II-18
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	II-38
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD pada Tahun 2025-2030	III-4
Tabel 3.2.	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan BPKPD	III-7
Tabel 3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPD	III-11
Tabel 3.4.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKPD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-12
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Renstra BPKPD	III-21
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2027	IV-2
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja Utama BPKPD Tahun 2025-2030	V-2
Tabel 5.2.	Indikator Kinerja Kunci BPKPD Tahun 2025-2030	V-3

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004	I-8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2027, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

I. Persiapan Penyusunan;
II. Penyusunan Rancangan Awal;
III. Penyusunan Rancangan;
IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
V. Perumusan Rancangan Akhir;
VI. Penetapan Rancangan Awal Renja PD.

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	**Persiapan Penyusunan Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																						
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																						
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																						
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																						
B	**Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																						
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																						
C	**Penyusunan Rancangan Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																						
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
D	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD**																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
E	**Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027**																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																							
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																								
F	**Penetapan Renja PD 2027**																																								
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																						
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																						

Proses Penyusunan Renja

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,dilaksanakan sebagai berikut:
   1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex- Officio* yang dikeluakan tanggal 31 Desember 2024.
   2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2025, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2026. Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rancangan Awal Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Awal Renja PD. Rancangan Awal Renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi RKPD.

Penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4 Februari 2026. Kemudian, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD untuk menjamin Rancangan Renja PD sudah selaras dengan ranwal RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Rancangan Awal Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD.

Forum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2026 di Aula Lantai II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang dihadiri secara luring (*offline*) dan daring (*online*).

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimulai

pada bulan Juli 2026 dan diserahkan kepada Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Rancangan Awal Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapalitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bapalitbangda

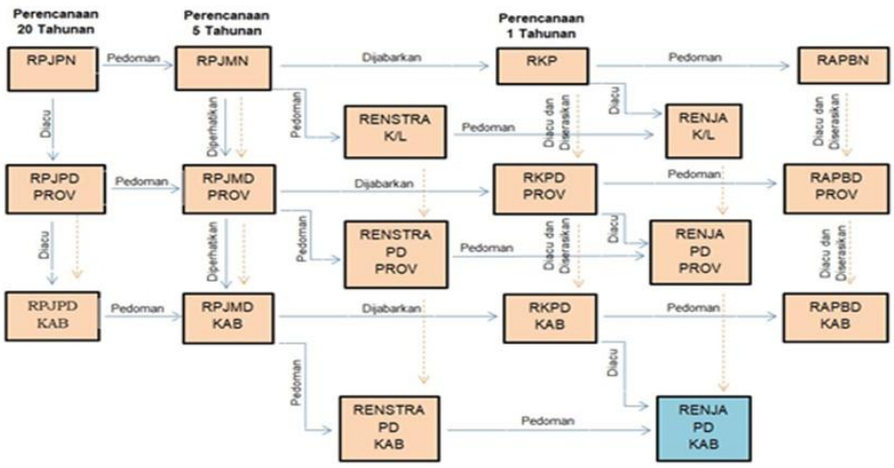
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

Penyusunan Rancangan Awal Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Rancangan Awal Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rancangan Awal Renja K/L dan Rancangan Awal Renja PD

Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petujuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan
   Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.
   Berisi evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan sebagainya.
III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
   Memuat telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027.
IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
   Bab ini menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
V. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
   Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja BPKPD Tahun 2025.
VI. Penutup
   Berisi ketentuan penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Bab ini memuat reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD tahun 2025 (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun 2026 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Reviu ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BPKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKPB dan realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 6 kondisi di atas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Di samping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan pada tabel 2.1 dihalaman berikut ini:

Tabel . 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuagan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan s/d Tahun 2026

Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output) 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra BPKPD) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja BPKPD tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja BPKPD s/d Tahun 2026	
									Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5	2				KEUANGAN									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85 Poin	- 85	-	-	-	85	85 Poin	85 Poin
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra , Rancangan Awal Renja (Dokumen)	20 Dok	8 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	12 Dok	60 %

5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	50	%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	-	Dok	2	Dok	33	%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	50	%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20	Dok	8	Dok	2	Dok	4	Dok	100	%	4	Dok	12	Dok	60	%

5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	60	Dok	24	Dok	12	Dok	12	Dok	100	%	-	Dok	24	Dok	40	%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP , PK , RKT , IKU , RAP, LKPJ, LPPD , EKPP, SIRUP , SPIP , Gender)	40	Lap	16	Lap	12	Lap	12	Lap	100	%	8	Dok	24	Lap	60	%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85	Poin	-	85		-		-		-	85		85	Point	85	Point
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	60	Bulan	24	Bulan	64	Orang /Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	60	%

5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	60	%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semester	85	Dok	34	Dok	13	Dok	17	Dok	100	%	17	Dok	51	Dok	60	%
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	-	Dok	2	Dok	40	%
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	Poin		85				-		-	85		85	Poin	85	Poin

5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	970	Stel	106	Stel	0	Stel	0	Stel	0	%	-	Stel	212	Stel	22	%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	10	Kali	4	Kali	7	Kali	2	Kali	100	%	2	Kali	6	Kali	60	%
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasPeraturan Perundang-Undangan	30	Kali	6	Kali	1	Kali	4	Kali	100	%	1	Kali	7	Kali	23	%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135	Dok	48	Dok	24	Dok	36	Dok	17	%	12	Dok	72	Dok	53	%
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	144	Lap	48	Lap	24	Lap	24	Lap	100	%	24	Lap	72	Lap	50	%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540	Lap	180	Lap	60	Lap	90	Lap	81	%	90	Lap	270	Lap	50	%
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100	%		100%			-		-				-	%	-	%
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	-	Unit	-	%
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	30	Unit	5	Unit	0	Unit	5	Unit	100	%	-	Unit	10	Unit	33	%
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Unit	13	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	5	Unit	33	%

5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100	%	100	%		-		-		-	100		100	%	200	-
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Lap	2	Lap	1	Lap	1	Lap	50	%	1	Lap	3	Lap	50	%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Lap	2	Lap	12	Lap	1	Lap	75	%	1	Lap	3	Lap	50	%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Lap	2	Lap	12	Lap	1	Lap	75	%	1	Lap	3	Lap	50	%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100	%	-	100%		-		-		-	100		100	%	100	%
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198	Unit	66	Unit	33	Unit	33	Unit	84	%	33	Unit	99	Unit	50	%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210	Unit	70	Unit	35	Unit	35	Unit	88	%	33	Unit	103	Unit	49	%

5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	%	-	Unit	1	Unit	17	%
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD		WTP		WTP		WTP		WTP	100	%		WTP	100	WTP	100	%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD		WTP		WTP		WTP		WTP	100	%		WTP	100	WTP	100	%
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	"1. KUA dan PPAS (2 dok) 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	12	Dok	4	Dok	2	Dok	2	Dok	100	%	2	Dok	6	Dok	50	%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. KUA-P dan PPAS-P 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	12	Dok	4	Dok	2	Dok	2	Dok	0	%	2	Dok	6	Dok	50	%
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	276	Dok	92	Dok	46	Dok	46	Dok	100	%	46	Dok	138	Dok	50	%
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	276	Dok	92	Dok	46	Dok	46	Dok	100	%	46	Dok	138	Dok	50	%

5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	276	Dok	92	Dok	48	Dok	46	Dok	100	%	46	Dok	138	Dok	50	%
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA SKPD (46 DPPA)	276	Dok	92	Dok	46	Dok	46	Dok	100	%	46	Dok	138	Dok	50	%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	36	Dok	12	Dok	6	Dok	6	Dok	100	%	6	Dok	18	Dok	50	%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	36	Dok	12	Dok	6	Dok	6	Dok	100	%	6	Dok	18	Dok	50	%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24	Dok	8	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	4	Dok	12	Dok	50	%
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil	12	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	%	-	Kali	-	Kali	-	%

5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	24	Kali	8	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	Kali	12	Kali	50	%
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Pembiayaan	12	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100	%	-	Kali	4	Kali	33	%
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Workshop	12	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100	%	-	Kali	4	Kali	33	%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD		WTP		WTP		WTP		WTP	100	%				WTP	100	%
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	72	Dok	48	Dok	12	Dok	12	Dok	100	%	12	Dok	36	Dok	50	%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.032	Dok	172	Dok	172	Dok	172	Dok	100	%	172	Dok	516	Dok	50	%
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	16	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	-	Dok	8	Dok	50	%

5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana transfer Lainnya	480	Dok	80	Dok	80	Dok	80	Dok	100	%	80	Dok	240	Dok	50	%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi	4	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	%	-	Kali	-	Kali	-	%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot o ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunjangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	108	Dok	18	Dok	18	Dok	18	Dok	100	%	18	Dok	54	Dok	50	%

5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catur Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahapan)	54	Kali	9	Kali	9	kali	9	kali	100	%	-	kali	18	Kali	33	%
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	516	Dok	86	Dok	86	Dok	86	Dok	100	%	-	Dok	172	Dok	33	%
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	Peraturan	1	Peraturan	1	Peraturan	1	Peraturan	100	%	1	Peraturan	3	Peraturan	50	%

5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD		WTP		WTP		WTP		WTP	100	%		WTP		WTP	100	%
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan 3. laporan Keuangan Semester 4. laporan Prognosis	96	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	100	%	-	Dok	32	Dok	33	%
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan ,Pendapatan-Lo dan beban	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,Ekuitas, Penadapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban	72	kali	12	kali	12	kali	12	kali	100	%	12	kali	36	kali	50	%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Konsultasi Ke BPK	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	kali	12	Kali	50	%
						- Penyampaian Laporan ke Propinsi	18	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok	100	%	3	Dok	9	Dok	50	%

5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD)	258	Lap	43	Lap	43	Lap	43	Lap	100	%	43	Lap	129	Lap	50	%
						2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 puskesmas, 1 RSUD)	144	Lap	24	Lap	24	Lap	24	Lap	100	%	24	Lap	72	Lap	50	%
						3. Rekonsiliasi data BLUD (4 Kali)	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	Kali	12	Kali	50	%
						4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						2. Nota Penyampaian LPP APBD (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						3. Perda APBD (	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%

						60 buku)														
						4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali)	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	kali	12	Kali	50	%
						5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali)	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	kali	12	Kali	50	%
						6. Penyampaian Evaluasi (1 kali)	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
						7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok)	24	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	-	Dok	8	Dok	33	%
						- Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	24	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	-	Dok	8	Dok	33	%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat	12	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	%	-		-	kali	-	%
						- Terlaksananya tindak lanjut TPTGR	6	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	%	-		-	kali	-	%

						- Tersedianya data TPTGR dari OPD	12	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	%	-		-	Dok	-	%
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD	12	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	100	%	-	Lap	4	Lap	33	%
						2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Ranperda LPP APBD	12	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	100	%	-	Lap	4	Lap	33	%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						2. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						4. Konsultansi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian	12	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100	%	2	Kali	6	Kali	50	%

						keuangan RI (2 kali)															
						5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	6	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	50	%
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	-	Buku	120	Buku	33	%
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. laporan keuangan daerah (Buku)	6	Buku	1	Buku	6	Buku	6	Buku	100	%	-	Buku	7	Buku	117	%
						2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah	12	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100	%	-	Kali	4	Kali	33	%
						3. Bimtek penyusunan laporan keuangan (2 kali)	12	Kali	2	Kali	2	Kali	2	Kali	100	%	-	Kali	4	Kali	33	%
						4. Pendampingan penyusunan laporan	6	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	-	Paket	2	Paket	33	%

						keuangan daerah (1 paket)														
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
						2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	18	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	3	Bulan	100	%	3	Bulan	9	Bulan	50	%
						3. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	72	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	%	-		-	Bulan	-	%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD		WTP	-	WTP	WTP	-	WTP	-	100	%				WTP	100	%
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	-	%	79	Nag	237	Nag	50	%
						Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%

						Teralokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%
						Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%
						Tersalurnya DD dan ADD	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%
						Terwujudnya pelaksanaan bantuan keuangan untuk Partai Politik	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Belanja Tidak Terduga	78	Kec	6	Kec	13	Kec	3	Kec	23	%	13	Kec	22	Kec	28	%
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	474	Nag	79	Nag	79	Nag	79	Nag	100	%	79	Nag	237	Nag	50	%
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengeloaan Keuangan Daerah secara elektronik	95	%	95	%		-		-		-			95	%	95	%
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	72	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	50	%

					Daerah														
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Whorkshop Aplikasi dan Sosialisasi	176	Orang	96	Orang	96	Orang	96	Orang	100	%	50	Orang	242	Orang	138	%
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP			WTP					100	%				WTP	100	%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100	%	100	%									100	%	100	%
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	330	Buku	55	Buku	55	Buku	55	Buku	100	%	55	Buku	165	Buku	50	%
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	-	Dok	2	Dok	33	%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD	330	Buku	55	Buku	55	Buku	55	Buku	100	%	55	Buku	165	Buku	50	%
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKPMD	330	Buku	55	Buku	55	Buku	55	Buku	100	%	-	Buku	110	Buku	33	%

5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku lampiran aset 20 buku)	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	-	Buku	40	Buku	33	%
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku inventaris aset 20 buku)	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	-	Buku	40	Buku	33	%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	90	Pensil	15	Pensil	15	Pensil	15	Pensil	100	%	25	Pensil	55	Pensil	61	%
						- pancang tanah	204	Buah	34	Buah	34	Buah	10	Buah	29	%	20	Buah	64	Buah	31	%
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	1.488	Pensil	248	Pensil	200	Pensil	200	Pensil	100	%	-	Pensil	448	Pensil	30	%
						- pancang tanah	204	Buah	34	Buah	34	Buah	34	Buah	100	%	-	Buah	68	Buah	33	%
						- penghapusan	180	Buah	30	Buah	30	Buah	30	Buah	100	%	-	Buah	60	Buah	33	%
						- penilaian gedung	180	Buah	30	Buah	30	Buah	30	Buah	100	%	-	Buah	60	Buah	33	%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	480	Buah	80	Buah	80	Buah	80	Buah	100	%	80	Buah	240	Buah	50	%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtangananan BMN	6	Dok	1	Dok	1	Dok	-	Dok	-	%	-	Dok	1	Dok	17	%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	20	Buku	60	Buku	50	%

5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	20	Buku	60	Buku	50	%
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek terhadap 43 OPD	258	OPD	43	OPD	43	OPD	43	OPD	100	%	-	OPD	86	OPD	33	%
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		0,8%		: 0,8%		: 0,8%		: 0,8%		: 0,8 %				: 0,8%		: 0,8%
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		: 0,8%		: 0,8%		: 0,8%		: 0,8%		: 0,8 %				: 0,8%		: 0,8%
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	- Tersusunnya potensi pajak daerah	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	50	%
						- Tersusunnya ranperbup pajak daerah	12	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	100	%	2	Dok	6	Dok	50	%
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	6	Dok	1	Dok	1	Dok	-	1	-	%	1	Dok	2	Dok	33	%
						- Terlaksanya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	60	Lap	10	Lap	10	Lap	10	Lap	100	%	10	Lap	30	Lap	50	%

						- Tersusunnya ranperbup/ranperda Pajak Daerah	24	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	4	Dok	12	Dok	50	%
						- Tersusunnya SOP Pajak Daerah	24	SOP	4	SOP	4	SOP	4	SOP	100	%	4	SOP	12	SOP	50	%
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap WP dan aparatur	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	Kali	12	Kali	50	%
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya alat dan SPM penunjang pendataan dan penilaian	12	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	%	2	Jenis	6	Jenis	50	%
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melakukan Pendataan OP dan WP	270	OP	45	OP	45	OP	45	OP	100	%	45	OP	135	OP	50	%
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	50	%
						- Tersusunnya Laporan Basis Data Pajak Daerah	12	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	100	%	2	Lap	6	Lap	50	%
						- Tersedianya Software/aplikasi pajak daerah	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	-	Unit	2	Unit	40	%
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penillaian objek pajak dan wajib retribusi (100 OP)	600	OP	100	OP	100	OP	100	OP	100	%	100	OP	300	OP	50	%

5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 OP)	1.500	OP	250	OP	250	OP	250	OP	100	%	250	OP	750	OP	50	%
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayaninya keberatan/keluhan wajib pajak	240	WP	40	WP	40	WP	40	WP	100	%	40	WP	120	WP	50	%
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen hasil penelitian dan verifikasi data SP dan OP	30	Dok	5	Dok	5	Dok	5	Dok	100	%	5	Dok	15	Dok	50	%
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil Penagihan Pajak	24	Lap	4	Lap	4	Lap	4	Lap	100	%	4	Lap	12	Lap	50	%
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasinya keberatan wajib pajak	40	WP	10	WP	4	WP	4	WP	100	%	-	WP	14	WP	35	%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Terlaksanya pembinaan dan penertiban pajak daerah	48	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	100	%	8	Kali	24	Kali	50	%
						- Terlaksanya pemeriksaan pajak daerah	30	WP	5	WP	5	WP	5	WP	100	%	5	WP	15	WP	50	%
						- Terlaksanya monitoring pajak daerah	120	Kali	20	Kali	20	Kali	20	Kali	100	%	20	Kali	60	Kali	50	%
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksanya monitoring Retribusi Daerah	72	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100	%	12	Kali	36	Kali	50	%
						- Terlaksanya rapat monev Retribusi Daerah	24	Kali	4	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	4	Kali	9	Kali	38	%

5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transakssi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	18	Lap	3	Lap	3	Lap	3	Lap	100	%	3	Lap	9	Lap	50	%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan
   Pada Tahun 2025 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan yaitu:
   1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar 73,60%, yang mana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tidak dapat ditetapkan karena tidak tercapainya kesepakan dengan DPRD.
   2. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah realisasi keuangan sebesar 62,83%, yang mana Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Akuntasi masih berupa draf.

II. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
   a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
      1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.724.500 realisasi keuangan Rp. 1.123.817.904 (86,73 %) atau realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
      2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.498.700 realisasi keuangan Rp 442.837.616 (93,33 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
      3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.446.523.300 realisasi keuangan Rp 365.177.046 (81,78 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
      4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.294.664.234 realisasi keuangan Rp. 166.012.780.891 (97,49 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
      5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.680.000 realisasi keuangan Rp. 288.701.850

(92,04 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 691.643.700 realisasi keuangan Rp.613.547.065 (88,71 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.723.757.950 realisasi keuangan Rp.1.618.617.726 (93,90 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Rasio PAD terhadap Pendapatan

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.751.840 realisasi keuangan Rp. 105.424.000 (93,50 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.361.098.688 realisasi keuangan Rp. 13.691.772.981 (95,34 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000 realisasi keuangan Rp. 8.497.000 (67,98 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 638.911.200 realisasi keuangan Rp. 607.893.283 (95,15 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.310.000 realisasi keuangan Rp. 152.964.375 (95,42 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 671.497.750 realisasi keuangan Rp. 664.886.522 (99,02 %) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 592.872.000 realisasi keuangan Rp. 556.698.322 (93,90 %) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

III. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2025 program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, umumnya semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Fungsi Antara lain :

a. Perumusan teknis dibidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Perumusan teknis dibidang Penagihan, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
c. Perumusan teknis dibidang Aset Daerah;
d. Perumusan teknis dibidang Anggaran;
e. Perumusan teknis dibidang Perbendaharaan;
f. Perumusan teknis dibidang Akuntansi
g. Pelaksana Administrasi badan; dan

h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 disajikan dalam tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kinerja sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri atas dua (2) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai 2 indikator :
   a. Opini BPK terhadap LKPD
   b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip, yang mempunyai 2 indikator yaitu :
   a. Skor IKM Badan Keuangan
   b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan

Pada Tahun 2024, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Sebesar 81,49 %.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU Kepala BPKPD	Target Renstra Badan Keuangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun2026	2027	2028	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Rasio PAD Terhadap PDRB		IKD	√	√	0,19	0,21	0,23	0,25	0,21	0,21	0,23	0,25	
2	Opini BPK atas LKPD (WTP)		IKK		√	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Realisasi tahun 2025 sesuai target Proyeksi Realisasi Capaian Tahun 2027 dan 2028 adalah sesuai target
3	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKPD				√	68,52	70,25	71,20	72,70	73,58	73,58	91,97	93,96	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dengan penyelenggaraan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka dampaknya terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terciptanya pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam wujud laporan keuangan daerah
2. Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa "Wajar Tanpa Pengecualian"
3. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
4. Terbitnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya
2. Belum optimalnya proses penyusunan APBD
3. Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait
4. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah
5. Belum optimalnya penggunanan teknologi informasi untuk kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimal Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Belum sesuainya pemanfaatan alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Perencanaan Anggaran disebabkan sering berubahnya regulasi
			Masih rendahnya komitmen kepala Badan Keuangan dalam Perencanaan Anggaran

		Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Belum konsistenya perencanaan kegiatan dengan alokasi aliran kas
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam pengelolaan perbendaharaan disebabkan sering berubahnya regulasi
			Belum optimalnya aplikasi SIPD pada modul penatausahaan
			Masih belum terkoneksinya sistem aplikasi pemda dengan lembaga lainnya
		Belum Optimalnya peningkat Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Belum memadainya Penerapan aplikasi SIPD dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Akuntansi disebabkan sering berubahnya regulasi
		Belum Optimalnya peningkat kualitas pengelolaan barang milik daerah	Menuntut kesiapan aparatur untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan asset yang sering berubah
			Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien
			Belum semua aset daerah berupa tanah bersertifikat
			Belum terkoneksinya SIPD dengan Aplikasi Aset Daerah (SIMDA)
2	Masih rendahnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Masih kurangnya tingkat akurasi dan aktualitas data pendapatan asli	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pemungutan pajak daerah
			Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan sebagai pendukung dalam

		daerah	pengelolaan pajak daerah
			Belum tersedianya insfrastruktur ETPD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah
		Rendahnya tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah
			Belum tersedianya tenaga (penilai, penagih, juru sita, pemeriksa) yang dibutuhkan sesuai speksifikasi.
			Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pajak daerah
			Belum intensifnya kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan
			Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Keuangan hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan
dan peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul memerlukan koordinasi.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencarikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan

koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Motor penggerak program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi
9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap Objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara Berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan asset

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2025-2029 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 :			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.			
	Program Prioritas :			
	1. Penunjang urusan pemerintahan daerah	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
	2. Pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
	3. Pengelolaan barang milik daerah	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	Kurangnya kemampuan SDM pengelola barang milik daerah di OPD	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah
	4. Pengelolaan pendapatan daerah	Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait	1. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pemungutan pajak daerah 2. Belum diterapkannya	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemungutan pajak daerah

			sanksi bagi aparatur dan wajib pajak	
2.	Misi 2			
	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah 1. Pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan	1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang strategis berbatasan dengan Provinsi Riau

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Rancangan Awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan kegiatan Badan Keuangan tidak mengalami perubahan atau sama dengan Rancangan Awal Renja Badan Keuangan Pelaksanaan kegiatan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD
2. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
3. Penyesuaian Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Pada akhirnya, Rancangan Awal Rancangan Awal Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH										
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN										
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		*Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah*	100 %	52.172.923.499,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah*	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarilamak	*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	175.530.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarilamak	*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	124.186.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	36.995.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	18.185.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

		Sarilamak	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	18.461.200,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	16.637.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	18.234.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	17.777.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	17.040.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	18.216.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	31.808.300,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	18.379.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

		Sarilamak	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	22 Laporan	26.492.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	0 Laporan	16.256.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	26.499.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	18.735.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sarilamak	*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	49.973.716.719,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sarilamak	*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	18.796.362.407,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	6425 Orang/bulan	49.973.716.719,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	6425 Orang/bulan	18.700.045.407,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan*	1 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan*	1 Laporan	32.123.900,00	

			Akhir Tahun SKPD					*Akhir Tahun SKPD*			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	2 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	2 Laporan	32.209.900,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	0 Dokumen	31.983.200,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Skor IKM Badan Keuangan*	85 .	0,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Skor IKM Badan Keuangan*	85 .	0,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										

		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	0 Laporan	0,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	330.013.600,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	0,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	12 Dokumen	195.001.500,00		Sarilamak	*Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah*	Dokumen	0,00	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah*	100 Dokumen	135.012.100,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah*	Dokumen	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Skor IKM Badan Keuangan*	85 Indek	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Skor IKM Badan Keuangan*	85 Indek	74.400.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	105 Orang	0,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Orang	24.600.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	95 Orang	0,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	95 Orang	49.800.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	686.242.880,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	277.979.400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Sarilamak	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	35.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	18.664.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Sarilamak	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	30.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	9.728.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Sarilamak	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	36.500.000,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	7.030.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Sarilamak	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	144.101.680,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	28.571.400,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

		Sarilamak	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	42.593.200,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	13.552.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	0 Dokumen	19.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	135.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	19.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	244.048.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	180.934.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Skor IKM Badan Keuangan*	85 .	232.000.000,00			*Skor IKM Badan Keuangan*	85 .	863.187.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Sarilamak	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	4 Unit	0,00		Sarilamak	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	4 Unit	654.380.000,00	

	Pengadaan Mebel										
		Sarilamak	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	25 Unit	232.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	10 Unit	76.922.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Sarilamak	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*		7 Unit 0,00		Sarilamak	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	131.885.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	276.440.000,00			*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	483.208.980,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	26.440.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	250.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	153.999.980,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	329.209.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	498.980.000,00			*IKM Badan Keuangan*	85 Indek	665.858.000,00	

	Daerah										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Sarilamak	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	37 Unit	423.980.000,00		Sarilamak	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	49 Unit	445.870.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Sarilamak	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	35 Unit	75.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	35 Unit	19.970.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Sarilamak	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0,00		Sarilamak	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.018.000,00	
2,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		*Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP	6.833.097.600,00					129.679.133.407,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		*Opini Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	2.389.272.200,00			*Opini Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	1.017.702.300,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	314.158.800,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	162.310.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	269.261.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	165.478.200,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	168.544.400,00		Sarilamak	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	57.916.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	235.857.500,00		Sarilamak	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	127.108.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	160.135.000,00		Sarilamak	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi*	42 Dokumen	56.240.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
		Sarilamak	*Jumlah PerubahanDPA-SKPD yang Diverifikasi*	126Dokumen	178.450.000,00		Sarilamak	*Jumlah PerubahanDPA-SKPD yang Diverifikasi*	126 Dokumen	111.507.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Sarilamak	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	6 Dokumen	371.706.900,00		Sarilamak	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	6 Dokumen	137.580.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										

		Sarilamak	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	6 Dokumen	298.438.000,00		Sarilamak	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	6 Dokumen	193.114.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	4 Dokumen	151.721.100,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	4 Dokumen	6.448.400,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	6 Dokumen	50.455.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	Dokumen	0,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	84 Orang	190.544.500,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Orang	0,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		*Opini Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	0,00			*Opini Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	209.057.500,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										

		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	12 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	12 Dokumen	34.997.300,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	172 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	172 Dokumen	15.000.000,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	12 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	12 Dokumen	37.140.200,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	12 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	12 Dokumen	11.575.000,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama	2 Dokumen	0,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan	2 Dokumen	18.710.000,00	

			dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*		18 Laporan 0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan*	18 Laporan	13.030.000,00	

								Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	9 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	9 Dokumen	17.415.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	86 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	86 Dokumen	28.762.000,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										

		Sarilamak	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	8 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	8 Dokumen	32.428.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	100 Orang	0,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	0 Orang	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP .	1.165.381.400,00			*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP .	313.696.800,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban*	12 Dokumen	84.073.800,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban*	4 Dokumen	25.002.000,00	

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	4 Laporan	69.928.500,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	12 Laporan	50.070.500,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	65 Laporan	124.394.500,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	12 Laporan	30.123.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	221.806.400,00		Sarilamak	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	5 Dokumen	75.006.000,00	

	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	2 Dokumen	86.812.300,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	2 Dokumen	52.024.000,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	60 Dokumen	204.791.700,00		Sarilamak	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	31.391.000,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	2 Orang	373.574.200,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	5 Orang	25.081.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP -	2.510.000.000,00			*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP -	128.058.428.407,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										

		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	12 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	12 Laporan	119.958.428.407,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	2.510.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	12 Laporan	1.500.000.000,00	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	12 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	12 Laporan	6.600.000.000,00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP .	768.444.000,00			*Opini BPK terhadap LKPD*	WTP .	80.248.400,00	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	12 Dokumen	484.944.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	12 Dokumen	44.805.400,00	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										

		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota*	182 Orang	283.500.000,00		Sarilamak	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota*	100 Orang	35.443.000,00	
3,	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		*Indeks pengelolaan barang milik daerah*	93 point	1.049.006.300,00					572.500.000,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		*Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	1.049.006.300,00			*Opini BPK Terhadap LKPD*	WTP .	572.500.000,00	
	Penyusunan Standar Harga										
		Sarilamak	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1 Dokumen	90.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	1 Dokumen	23.220.200,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	45.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Dokumen	24.545.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	54.999.900,00		Sarilamak	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	7.546.900,00	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0,00		Sarilamak	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		

	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	55.998.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	45.016.000,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	12 Laporan	96.575.250,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	12 Laporan	59.999.900,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	97.970.100,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	203.982.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	12 Laporan	155.306.800,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	4 Laporan	38.386.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	164.999.700,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	12 Laporan	18.566.000,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										

		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	84.999.900,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtan ganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	12 Dokumen	22.450.500,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	4 Laporan	124.999.850,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	22.523.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	2 Laporan	78.156.800,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	2 Laporan	57.265.200,00	
4,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		*Persentase PAD terhadap pendapatan*	9,67 %	1.978.910.900,00					1.108.265.675,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		*Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah*	1:0,0967	1.978.910.900,00			*Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah*	1:0,0967	1.108.265.675,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	9 Dokumen	203.940.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	12 Dokumen	35.000.025,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										

		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	4 Dokumen	280.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	12 Dokumen	30.000.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	12 Laporan	137.502.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	13 Laporan	50.000.100,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	12 Unit	194.996.600,00		Sarilamak	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	7 Unit	368.239.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				Sarilamak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	70.006.100,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	9 Laporan	319.173.900,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data*	12 Laporan	70.006.100,00	

								Pajak Daerah			
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
		Sarilamak	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	11 Obyek Pajak	145.001.100,00		Sarilamak	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	12 Obyek Pajak	80.000.000,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	0 Dokumen	0,00		Sarilamak	*Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya*	12 Dokumen	25.000.000,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*	40 Layanan	80.000.000,00		Sarilamak	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	12 Layanan	25.010.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	50 Dokumen	146.492.300,00		Sarilamak	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	12 Dokumen	25.000.500,00	
	Penagihan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	150 Dokumen	169.996.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	140.020.000,00	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan*				Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian*	12 Dokumen	19.999.900,00	

			Pajak Daerah					*Keberatan Pajak Daerah*			
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	8 Dokumen	188.509.000,00		Sarilamak	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	12 Dokumen	100.000.050,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	4 Laporan	0,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	12 Laporan	14.990.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	10 Laporan	113.300.000,00		Sarilamak	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	4 Laporan	50.000.000,00	
					62.033.938.299,00					152.645.081.669,00	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena hakekatnya masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat kedalam Renja BPKPD

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2027

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	---------- N I H I L ----------				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional di bidang keuangan tahun 2027 menekankan penguatan stabilitas fiskal, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi pendapatan negara dan daerah. Pemerintah mendorong konsolidasi fiskal melalui efisiensi anggaran, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan kapasitas pendapatan, termasuk melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan PNBP. Arah kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas penganggaran, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintahan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. BPKPD berperan sebagai perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran nasional melalui pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan APBD, pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, BPKPD juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kualitas basis data perpajakan daerah, pengembangan inovasi pelayanan perpajakan berbasis digital, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sisi pengelolaan keuangan, BPKPD dituntut untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD, memperkuat manajemen risiko, serta mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat manajemen pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemutakhiran data objek pajak, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Di sisi belanja, kebijakan nasional mendorong penguatan pengelolaan APBD yang berbasis kinerja, peningkatan efisiensi belanja, serta pengendalian disiplin anggaran agar APBD lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tersebut, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital; peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD; penguatan pengelolaan aset daerah; peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah; serta penyempurnaan layanan administrasi keuangan dan pendapatan. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah ”Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional” indikator tujuan yaitu “Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB”

Adapun Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ada 2 (dua) Sasaran adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
   Indikator Sasaran yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan
   Sasaran ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperoleh opini baik dari BPK.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
   Indikator Sasaran yaitu:
   a. Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
   b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
   c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

   Fokus sasaran ini adalah peningkatan kapasitas internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam memberikan layanan yang profesional dan berkinerja tinggi

3.2.1 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2027 dilakukan melalui rangkaian langkah yang terencana,

terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran fiskal daerah, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi kinerja internal perangkat daerah.

Untuk mendukung sasaran daerah, yaitu meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya mendorong optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sehingga kontribusi fiskal daerah terhadap perekonomian semakin kuat.

Dalam rangka mencapai Sasaran OPD, yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset, serta penegakan disiplin administrasi keuangan menjadi kunci untuk mempertahankan atau meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, perangkat daerah ini mengarahkan program pengembangan SDM, penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas proses bisnis, serta percepatan layanan administrasi keuangan dan pendapatan. Evaluasi internal melalui AKIP, penguatan nilai Reformasi Birokrasi (RB), serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi instrumen pengendali untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Melalui kombinasi upaya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan peningkatan kinerja fiskal daerah secara menyeluruh, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pencapaian pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2027.

Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2027, Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2027, Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2027, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola

keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah

Strategi Pencapaian Sasaran 1 – Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

- Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai prinsip value for money.
- Memperkuat disiplin administrasi keuangan dan penatausahaan aset daerah.
- Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis keuangan, akuntansi, dan pengelolaan aset.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintah untuk mendukung pencapaian Opini BPK yang lebih baik.

Strategi Pencapaian Sasaran 2 – Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kinerja serta Pelayanan BPKPD

- Mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis AKIP secara konsisten dan terukur.
- Memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan budaya kerja.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan, percepatan proses, dan pemanfaatan teknologi digital.
- Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan peningkatan nilai AKIP, RB, dan IKM secara berkelanjutan.
- Mendorong budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 di halaman selanjutnya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2027	2027	2028	2029	2030
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	4.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan	4.1.3 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2027 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Membangun Ekonomi Kerakyatan Dan Pariwisata Yang Tangguh Dan Berkeadilan”.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 4 program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam 4bagian, yaitu:

1. Program dan kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Keuangan;
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Barang Milik Daerah;
4. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Barang Pendapatan;

Ringkasan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel - 3.2
Program dan kegiatan dan Subkegiatan BPKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
A.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang ada Pada Setiap PD		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11. Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Semesteran 12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23. Fasilitasi Kunjungan Tamu 24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26. Pengadaan Mebel 27. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29. Penyediaan jasa surat menyurat 30. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31. Penyediaan jasa administrasi keuangan 32. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lingkup Urusan Keuangan		
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	36. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 37. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 38. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 39. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 40. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 41. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 42. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 43. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 44. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 45. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 46. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 47. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	48. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 49. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 50. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 51. Penatausahaan Pembiayaan Daerah 52. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 53. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 54. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

			Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 55. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 56. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 57. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 58. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	59. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 60. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 61. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 62. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 63. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 64. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 65. Rekosiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan 66. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 67. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 68. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah DaerahPemerintah Daerah 69. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 70. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

		11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	71. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 72. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 73. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
		12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	74. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 75. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	13. Pengelolaan Barang Milik Daerah	76. Penyusunan Standar Harga 77. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 78. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 79. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 80. Penatausahaan Barang Milik Daerah 81. Inventarisasi Barang Milik Daerah 82. Pengamanan Barang Milik Daerah 83. Penilaian Barang Milik Daerah 84. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 85. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 86. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 87. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 88. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	89. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 90. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 91. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 92. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 93. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 94. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 95. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 96. Penetapan Wajib Pajak Daerah 97. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 98. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 99. Penagihan Pajak Daerah 100. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 101. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 102. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 103. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berdasarkan dua pengelompokan tersebut maka untuk tahun 2027 BPKPD melaksanakan 5 Program dengan 15 Kegiatan dan 103 Subkegiatan.

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada fungsi koordinasi, fasilitasi, serta sinkronisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah teknis, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.3 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pendukungan Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5

1.	Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah	Rasio PAD Terhadap PDRB	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 8. Penetapan Wajib Pajak Daerah 9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 11. Penagihan Pajak Daerah 12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Namun demikian, meskipun tidak melaksanakan Sub Kegiatan prioritas secara langsung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keterpaduan pengelolaan Keuangan . Melalui fungsi koordinatif tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi penggerak utama dalam mengarahkan perangkat daerah teknis agar pelaksanaan program prioritas daerah dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun mengenai uraian Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 pada halaman selanjutnya

Tabel .3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2027 dan Prakiraan Maju tahun 2028
Kabupaten Lima Puluh Kota

KODE					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2				KEUANGAN				152.645.081.669,00				155.258.028.507
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah	Kec. Harau	100 %	21.285.182.587,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	100 %	23.384.050.000,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	124.186.800,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	152.000.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	18.796.362.407,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	21.043.750.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	74.400.000,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	85.000.000,00

5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	277.979.400,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	397.736.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	863.187.000,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	686.200.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	483.208.980,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	630.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	665.858.000,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	319.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	129.679.133.407,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	130.384.978.507
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	1.017.702.300,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	1.169.500.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	209.057.500,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	412.000.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	313.696.800,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	379.000.000

5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	128.058.428.407	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	128.098.896.507
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	80.248.400,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	325.582.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap LKPD	Kab.Lima Puluh Kota	WTP	572.500.000,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	574.500.000,00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kab.Lima Puluh Kota	WTP	572.500.000,00	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	574.500.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Kab.Lima Puluh Kota	10,35 %	1.108.265.675,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKD	10,35 %	914.500.000,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	1:0.0967	1.108.265.675,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKD	1:0,1035	914.500.000,00
TOTAL									152.645.081.669,00				155.258.028.507

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tahun 2027 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029.Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 dan terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasii Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 secara lengkap dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**152.645.081.669,00**								**35.299.600.100,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**152.645.081.669,00**								**35.299.600.100,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**152.645.081.669,00**								**35.299.600.100,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.285.182.587,00**								**23.384.050.000,00**	
			-	-		-	-	21.285.182.587,00							-	23.306.050.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						124.186.800,00						-		152.000.000,00	
		-						124.186.800,00						-		152.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	18.216.500,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.185.600,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	18.379.000,00							-	22.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	17.777.000,00							-	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	16.637.200,00							-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	16.256.000,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	18.735.500,00							-	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.185.600,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	18.185.600,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						16.637.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			17.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	16.637.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						17.777.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			19.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	3 Dokumen	17.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						18.216.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	18.216.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						18.379.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			22.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	18.379.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.256.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			22.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	16 Laporan	16.256.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.735.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			26.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	6 Laporan	18.735.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.796.362.407,00						-		21.043.750.000,00	
		-						18.796.362.407,00						-		21.043.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	31.983.200,00							-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	32.123.900,00							-	15.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	32.209.900,00							-	14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	18.700.045.407,00							-	21.000.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.700.045.407,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			21.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	76 Orang/bulan	18.700.045.407,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						32.123.900,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			15.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	32.123.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						32.209.900,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			14.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	32.209.900,00	Provinsi Sumatera Barat || Kab. Lima Puluh Kota || Kecamatan Harau || Desa Sarilamak || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						31.983.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			14.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	31.983.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						74.400.000,00						-		85.000.000,00	
		-						74.400.000,00						-		85.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	49.800.000,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	24.600.000,00							-	30.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						24.600.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	5 Orang	24.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						49.800.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			55.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	49.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277.979.400,00						-		274.400.000,00	
		-						277.979.400,00						-		274.400.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	19.500.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	180.934.000,00							-	161.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.571.400,00							-	26.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	13.552.000,00							-	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.664.000,00							-	19.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.728.000,00							-	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.030.000,00							-	6.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.664.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.664.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.728.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.728.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	24.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.030.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.571.400,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			26.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	28.571.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	26.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.552.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			18.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.552.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.500.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	19.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.934.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			161.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	180.934.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	161.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						863.187.000,00						-		910.500.000,00	
		-						863.187.000,00						-		910.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	76.922.000,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	654.380.000,00							-	750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	131.885.000,00							-	80.500.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						654.380.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			750.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	3 Unit	654.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						76.922.000,00			-	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"			80.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	76.922.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						131.885.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			80.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	7 Unit	131.885.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	80.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						483.208.980,00						-		431.500.000,00	
		-						483.208.980,00						-		431.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	153.999.980,00							-	154.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	329.209.000,00							-	277.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.999.980,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			154.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	153.999.980,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	154.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						329.209.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			277.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	329.209.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	277.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						665.858.000,00						-		486.900.000,00	
		-						665.858.000,00						-		486.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.018.000,00							-	18.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	445.870.000,00							-	443.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	19.970.000,00							-	25.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						445.870.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			443.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	49 Unit	445.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	443.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.970.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	19.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.018.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			18.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.018.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**129.679.133.407,00**								**10.426.550.100,00**	
			-	-		-	-	129.679.133.407,00							-	9.836.550.100,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.017.702.300,00						-		1.394.810.100,00	
		-						1.017.702.300,00						-		1.394.810.100,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	162.310.000,00							-	172.310.100,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	165.478.200,00							-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	6.448.400,00							-	22.500.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	56.240.000,00							-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	137.580.500,00							-	190.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	193.114.200,00							-	220.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	111.507.000,00							-	160.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	127.108.000,00							-	160.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	57.916.000,00							-	160.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						162.310.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			172.310.100,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	162.310.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	172.310.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						165.478.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			160.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	165.478.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						57.916.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			160.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	57.916.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						127.108.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			160.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	127.108.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						56.240.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			150.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	56.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						111.507.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	43 Dokumen	111.507.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						137.580.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			190.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	137.580.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						193.114.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			220.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	5 Dokumen	193.114.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						6.448.400,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			22.500.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	4 Dokumen	6.448.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						209.057.500,00						-		220.240.000,00	
		-						209.057.500,00						-		220.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	34.997.300,00							-	37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	11.575.000,00							-	12.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	-	18.710.000,00							-	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	-	17.415.000,00							-	18.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	-	37.140.200,00							-	40.140.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	15.000.000,00							-	16.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	28.762.000,00							-	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	13.030.000,00							-	14.500.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	-	32.428.000,00							-	32.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						34.997.300,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			37.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	12 Dokumen	34.997.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						15.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			16.800.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	172 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						37.140.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			40.140.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	12 Dokumen	37.140.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						11.575.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			12.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	12 Dokumen	11.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						18.710.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			19.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	2 Dokumen	18.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						13.030.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			14.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	18 Laporan	13.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						17.415.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			18.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	9 Dokumen	17.415.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						28.762.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			29.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	86 Dokumen	28.762.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	29.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						32.428.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			32.800.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	8 Dokumen	32.428.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	32.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						313.696.800,00						-		311.500.000,00	
		-						313.696.800,00						-		311.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	-	25.002.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	-	52.024.000,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-	-	31.391.000,00							-	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-	-	24.999.300,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	-	30.123.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	-	50.070.500,00							-	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.081.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	75.006.000,00							-	77.500.000,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						24.999.300,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-	12 Laporan	24.999.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						25.002.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			30.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	4 Dokumen	25.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						50.070.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-		-	12 Laporan	50.070.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						30.123.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			35.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-		-	12 Laporan	30.123.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						75.006.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"				
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	75.006.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	77.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						52.024.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			22.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	3 Dokumen	52.024.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						31.391.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			32.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	31.391.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						25.081.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	25.081.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						128.058.428.407,00						-		8.400.000.000,00	
		-						128.058.428.407,00						-		8.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	119.958.428.407,00							-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	6.600.000.000,00							-	6.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	1.500.000.000,00							-	1.600.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						119.958.428.407,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			0,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	12 Laporan	119.958.428.407,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa					-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						1.500.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	12 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						6.600.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			6.800.000.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	79 Laporan	6.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	6.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						80.248.400,00						-		100.000.000,00	
		-						80.248.400,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	-	44.805.400,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	35.443.000,00							-	50.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						44.805.400,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			50.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-		-	5 Dokumen	44.805.400,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						35.443.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	83 Orang	35.443.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**572.500.000,00**								**574.500.000,00**	
			-	-		-	-	572.500.000,00							-	574.500.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						572.500.000,00						-		574.500.000,00	
		-						572.500.000,00						-		574.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.450.500,00							-	28.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	48.999.300,00							-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	57.265.200,00							-	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	-	59.999.900,00							-	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	203.982.000,00							-	143.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	18.566.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	-	38.386.000,00							-	47.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.523.000,00							-	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	-	45.016.000,00							-	54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	7.546.900,00							-	40.000.000,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	24.545.000,00							-	35.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	23.220.200,00							-	32.500.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						23.220.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			32.500.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	1 Dokumen	23.220.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	32.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						24.545.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			35.000.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	24.545.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						7.546.900,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			40.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	7.546.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						48.999.300,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			17.500.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	4 Dokumen	48.999.300,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						45.016.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			54.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	1 Dokumen Laporan	45.016.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	54.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						59.999.900,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			62.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	59.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						203.982.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			143.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	203.982.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	143.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						38.386.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			47.500.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	4 Laporan	38.386.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	47.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						18.566.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	12 Laporan	18.566.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						22.450.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			28.000.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	12 Dokumen	22.450.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						22.523.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			27.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	2 Laporan	22.523.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						57.265.200,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			68.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	2 Laporan	57.265.200,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**1.108.265.675,00**								**914.500.000,00**	
			-	-		-	-	1.108.265.675,00							-	862.500.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.108.265.675,00						-		914.500.000,00	
		-						1.108.265.675,00						-		914.500.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	-	25.000.500,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	30.000.000,00							-	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	140.020.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	100.000.050,00							-	107.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	19.999.900,00							-	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	25.000.000,00							-	27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	35.000.025,00							-	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	14.990.000,00							-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	70.006.100,00							-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	75.000.000,00							-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	50.000.100,00							-	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	50.000.000,00							-	52.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	25.010.000,00							-	26.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	-	80.000.000,00							-	82.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	368.239.000,00							-	100.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						35.000.025,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			46.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	35.000.025,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						30.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			33.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	33.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						50.000.100,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			52.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	13 Laporan	50.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	52.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						368.239.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	7 Unit	368.239.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						70.006.100,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	70.006.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						75.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						80.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			82.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	12 Obyek Pajak	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	82.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						25.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			27.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						25.010.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			26.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	12 Layanan	25.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						25.000.500,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			30.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	12 Dokumen	25.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						140.020.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			150.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	140.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						19.999.900,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	19.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						100.000.050,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			107.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	100.000.050,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	107.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						14.990.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			17.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Laporan	14.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						50.000.000,00			-	-	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"			52.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	52.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**152.645.081.669,00**								**35.299.600.100,00**	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel . 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

No	Bidang Urusan	Tahun 2027		Tahun 2028	Tahun 2027		Tahun 2028
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	21.285.182.587,00	23.384.050.000,00	9	21.285.182.587,00	23.384.050.000,00
2	Urusan Keuangan	3	131.359.899.082	131.873.978.507	7	131.359.899.082	131.873.978.507
	Total	4	152.645.081.669,00	155.258.028.507	16	152.645.081.669,00	155.258.028.507

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya pada misi Membangun Ekonomi Kerakyatan Dan Pariwisata Yang Tangguh Dan Berkeadilan.

Penetapan indikator kinerja tahun 2027 disusun berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2025, kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, kemampuan fiskal daerah, serta arah kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan BPKPD difokuskan pada dua sasaran utama yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui pemeliharaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian sasaran strategis BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan	2025		Target					Ket
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,21	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	
2	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Target tahun 2027 diarahkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dari 0,19 persen menjadi 0,23 persen. Peningkatan tersebut dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perpajakan daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pada aspek tata kelola keuangan daerah, BPKPD menargetkan tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas laporan keuangan, percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah dan pendapatan daerah sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Tabel 5.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025		TARGET TAHUN					KET
			Target	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,21	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Nilai SAKIP BPKPD	Bobot	68.52	73,28	70,25	71,20	72,70	73,20	74,70	
4	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	47	47,39	47	30	30	30	30	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	22	26,34	22	40	40	40	40	
6	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,7	97,14	97,3	97,8	98,3	98,8	99	
7	Persentase Penurunan SILPA	%	3,3	3,82	2,8	2,2	1,7	1,2	1	
8	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pertambahan nilai aset tetap	%	5,45	5,60	5,75	6,25	6,55	6,85	7,15	
10	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10,15	10,62	11,65	13,15	14,65	16,15	17,65	
11	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Nagari	79	79	79	79	79	79	79	
12	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	%	25	30	40	55	70	85	100	

Target IKK Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 99,99 persen menjadi dasar dalam menetapkan target 100 persen pada tahun 2027. Demikian pula realisasi PAD sebesar 99,11 persen diharapkan dapat meningkat menjadi 100 persen melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP, BPKPD akan terus memperkuat kualitas pengelolaan aset daerah, penyajian laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga mencapai 100 persen.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 menjadi instrumen utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh target yang ditetapkan merupakan bentuk komitmen BPKPD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, serta mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.

Target-target tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan pengalokasian anggaran BPKPD Tahun 2027 sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2030.

BAB VI
PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Badan Keuangan disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 semakin berkualitas, dan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

6.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2027

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2027 merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah melaui perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Poin utama dari beberapa catatan penting tersebut diatas adalah bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Selain itu penyusunan dan tindak lanjut rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Hal ini memberi makna dalam bahasa sederhana bahwa rencana pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas baik kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan segala keterbatasan daerah terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain.

6.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja sebagai salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berorientasi kepada proses menggunakan pendekatan :

a. teknokratik, dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
b. partisipatif; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan berbagai pemangku kepentingan;
c. politis; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
d. atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up),* dalam artian perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 merupakan perwujudan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah, Rencana Kerja dirumuskan dan dilaksanakan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh

terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah,dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2027 ini disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kewenangan di bidang Keuangan melalui pilihan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I